

SEKRIPSI SUKMAWATI NIM 102221010014.pdf

by FAI 28

Submission date: 05-Aug-2026 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 3008379860

File name: SEKRIPSI_SUKMAWATI_NIM_102221010014.pdf (937.25K)

Word count: 14405

Character count: 92426

6

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH
TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD
LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SI)
program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Indragiri*



OLEH :

SUKMAWATI
NIM. 102221010014

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

6

Secara umum penelitian ini membahas mengenai pencegahan *Fraud* laporan keuangan namun, untuk secara khusus penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan. *Fraud* di Indonesia masih banyak terjadi di organisasi publik maupun swasta dan pada kenyataannya banyak tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang prakteknya banyak terjadi di Indonesia pada sektor bisnis, hal tersebut merupakan tindakan kecurangan (Sari *et al.*, 2024). *Fraud* sebagai tindakan yang tidak baik yang dapat merugikan banyak pihak. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *Mfraud* didefinisikan sebagai semacam yang dapat di pikirkan manusia, dan yang di upayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah ataupun pemaksaan, kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga (Sari *et al.*, 2024).

29

Istilah *Fraud* belum di kenal luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih akbar dengan istilah korupsi untuk merujuk segala bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri atau kelompok pelaku kedua istilah ini (*Fraud* dan korupsi) sama-sama merujuk dalam kejahatan (pidana) terencana yang merugikan Negara, organisasi, orang lain. Namun perlu di catat di sini bahwa *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari korupsi,

bahkan korupsi dalam arti tertentu juga dapat di kategorikan sebagai salah satu bagian dari *fraud* (Noholo, 2021).

Anderson²⁰ mendefinisikan pencegahan kecurangan sebagai penggunaan *control* pencegahan, seperti aturan, proses, pelatihan, dan komunikasi, untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun mungkin tidak memberikan jaminan 100% terhadap kecurangan, tindakan pencegahan merupakan garis pertahanan pertama yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Fitrawansyah (2014:16) menegaskan bahwa pencegahan kecurangan adalah cara yang mudah untuk memerangi kecurangan. Mencegah kecurangan sama halnya dengan mengobati penyakit yang terbaik adalah menghindarinya sama sekali (Lathifah Nur'aini & Arismutia, 2024).

Dalam hal memperkecil dan meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah mempersiapkan beberapa cara antara lain dengan sosialisasi pencegahan korupsi, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (*korsupgah*), dan mewajibkan seluruh kepala desa untuk melaporkan LHK (Laporan Kekeyaan) kades. Namun dalam keadaan tertentu kecurangan akan tetap timbul dengan adanya factor penunjang. Konsep *Fraud Triangle* yang di perluaskan Donald Cressey menerapkan⁸⁴ bahwa ada tiga factor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan tekanan, kesempatan, serta rasionalisasi (Kuntadi *et al.*, 2023).

Dari factor-faktor tersebut, korupsi menjadi umum terjadi di Indonesia terkhusus di sektor publik atau pemerintahan. Berdasarkan data pemetaan kejadian korupsi pada Indonesia dimana telah di himpun oleh *Indonesian Corruption Watch* (2023), khusus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor pada

tahun 2022 menyatakan bahwa sektor desa menjadi sektor memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Jumlah kasus korupsi di Indonesia pada sektor desa tahun 2022 yaitu sebanyak 155 kasus dan menjadikan sektor desa ini sangat rentan untuk terjadi korupsi (Kuntadi *et al.*, 2023).

Kontraktor Kembalikan Rp 1,6 Miliar, Kejari Inhil Tetap Lanjutkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan, ¹³ Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) menerima pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan rekonstruksi jalan ruas 16 Teluk Pinang-Lahang Baru tahun anggaran 2023. Pengembalian ini dilakukan oleh pihak kontraktor CV. Khaliqa Marta selaku penyedia jasa di dampingi ¹³ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Umar ⁹³ di Kantor Kejari Inhil, Kamis (8/5/2025) siang. Uang senilai Rp.1.601.476.210,34 secara simbolis diterima langsung oleh ¹³ Kepala Kejari (Kajari) Inhil Nova Fuspitasari, SH, MH di dampingi Kasi Pidsus Frengki Hutasoit dan jajaran Kajari Inhil. Temuan ini ¹³ berdasarkan hasil audit dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Inhil Tahun 2023 Nomor: 20.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 20 Mei 2024. Saat ini perkara tersebut dalam proses penyelidikan di bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Inhil ¹³ berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRINT 02/L.4.14/Fd.1/2/2025 tanggal 24 Februari 2025 (BPK RI, 2025)

⁶⁴ Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp15,4 Miliar, ⁴⁴ Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) secara resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rekonstruksi jalan ruas VI Pulau Kijang–Sanglar Tahun Anggaran (TA) 2023. Tersangka kedua adalah ⁸ Direktur PT Gunung Guntur, Eka Agus Syafrudin

selaku pelaksana kegiatan, dan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Inhil, Erwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Inhil, Selasa (10/6/2026).²⁴ Penetapan status tersangka ini merupakan hasil penyidikan intensif terhadap 23 saksi, dua orang ahli, serta penyertaan 79 dokumen yang relevan, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Nova Fuspitasari, Selasa malam (BPK RI, 2025)

Korupsi Proyek Jalan, Kontraktor Dituntut Lebih Tinggi dari Pejabat PUPR Inhil, PEKANBARU (CAKAPLAH).⁸ Dua terdakwa kasus korupsi proyek rekonstruksi Jalan Ruas VI Pulau Kijang–Sanglar Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang merugikan negara Rp6,27 miliar dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kedua terdakwa adalah Eka Agus Syafrudin,²⁴ Direktur PT Gunung Guntur selaku pelaksana kegiatan, dan Erwanto, Kabid Bina Marga Dinas PUTR Inhil yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). JPU menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan yang berbeda. Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa terbukti⁶⁵ melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa Eka Agus Syafrudin dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, dengan perintah tetap ditahan,” kata JPU Aditya⁸² di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Jonson Parancis, Senin (24/11/2025).

Selain pidana penjara, Eka dituntut membayar¹³ denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan⁸ membayar uang pengganti (UP) Rp5,3 miliar, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara 4 tahun 3 bulan. Sementara itu, terdakwa Erwanto dituntut pidana penjara 6 tahun 6 bulan. Ia juga

dibebankan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan dan UP Rp719 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana 3 tahun 3 bulan. Keduanya telah menitipkan pengembalian kerugian negara ke Kejari Inhil. Terdakwa Eka menitipkan sebesar Rp150 juta dan Erwanto Rp50 juta. Atas tuntutan JPU, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan pledoi. Sidang dijadwalkan berlanjut pekan depan. Dalam dakwaan JPU dijelaskan, proyek rekonstruksi jalan itu memiliki pagu anggaran Rp15,45 miliar, dengan kontrak ditandatangani pada 16 Agustus 2023 dan masa kerja hingga 28 Desember 2023.

Kontrak diteken oleh Erwanto selaku PPK dan Eka sebagai Direktur PT Gunung Guntur. Proyek menerima dua kali pembayaran. Uang muka 20% sebesar Rp3,07 miliar pada 8 September 2023 dan Termin 31,78% sebesar Rp4,15 miliar pada 29 Desember 2023. Namun, laporan akhir Konsultan Pengawas PT Ryan Syawal Consultant menyebutkan progres fisik baru 11,47%, jauh dari klaim penyedia proyek yang melaporkan progres 36,78%. Penyedia bahkan diduga memalsukan tanda tangan Supervisi Engineering dengan sepengetahuan PPK. Proyek sempat mengalami tiga kali addendum, termasuk perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2024. Hingga batas waktu itu, pekerjaan tidak kunjung selesai dan kontrak resmi diputus pada 17 Februari 2024. Pengecekan fisik oleh penyidik bersama ahli teknik sipil pada 9–12 Februari 2025 menemukan banyak kekurangan, terutama volume dan mutu beton. Berdasarkan audit Inspektorat Daerah Inhil, proyek ini menyebabkan kerugian Negara Rp6,27 miliar (CAKAPLAH.COM, 2025).

Kasus-kasus kecurangan yang semakin meningkat menandakan bahwa fenomena *fraud* telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, termasuk dalam sektor pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, sering kali terdengar aduan dari masyarakat mengenai terhadap distribusi anggaran di mana tak selaras atas prioritas keperluan yang sebenarnya. Halnya segelintir khusus yang menunjukkan adanya upaya efisiensi dan pengelolaan ekonomi yang baik fenomena tersebut mengindikasikan ³⁶ bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait akuntabilitas dan pengawasan. Apabila tidak diimbangi dengan kompetensi aparatur yang memadai serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik yang baik, maka potensi terjadi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin tinggi dan dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa ²¹ secara efektif dan efisien (Kuntadi *et al.*, 2023).

²⁷ Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana untuk publik di belanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah di belanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi menilai tolak kinerja yang telah di terapkan (Hidayat *et al.*, 2021)

⁴⁹ Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui ²⁵ tolak kinerja. Tolak ukur kinerja yang di terapkan tersebut dapat berupa

pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Salah satu tolak ukur kinerjanon keuangan yang perlu menjadi perhatian adalah kinerja sumberdaya manusia.

25

Sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumberdaya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi di sebabkan oleh kemampuan, pengetahuna, dan keterampilan. Kompetensi Aparatur pemerintah suatu sumber daya manusia adalah “ kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk ,encapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasli-hasil (*outcomes*) (Hidayat *et al.*, 2021). Sumber daya manusia pada pemerintah daerah adalah aparatur sipil negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menyatakn Bahwa, Pegawai Aparatul Sipil Negara yang selajutnya di sebut pegawai ASN adalah pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjajian kerja yang ditingkat oleh pejabat Pembina kepegawain dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahaan atau di serahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, mengklasifikasi, mengolah,dan menyajikan data transaksi serta bebagai aktivirtas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat di gunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Saat ini di Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi pemerintah yaitu penggunaan berbasis akrual dalam akuntansi nya indicator akuntansi sektor publik

adalah: andal, relevan, dapat di bandingkan, dan dapat di pahami (Khairan *et al.*, 2024).

Untuk mengetahui kualitas aparatur pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/ walikota melakukan pengawasan intern terhadap organisasi di pemerintahan tersebut. Pengawasan intern adalahn seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang menandai bahwa kegiatan telah di laksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah di terapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Khairan *et al.*, 2024).

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar aAkuntansi Pemerintah adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya dapat di sebut standar. Tujuan menjadi acuan bagi: (1) penyusunan standar dalam melaksanakan tugas, (2) Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulai masalah akuntansi yang belum di atur dalam standar, (3) pemeriksa dalam memeberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan di susun sesuai dengan standar, (4) para pengunga laporan keuangan belum menafsirkan

informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Sektor Pemerintah (Khairan et al., 2024).

Peranan akuntansi sektor publik diajukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Keberhasilan dalam suatu pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya. Contohnya jika suatu daerah tidak biasa mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya bisa diterima oleh masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat oleh karena itu peran pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Institusi di sektor publik menjalankan dan menggunakan sistem akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Pemerintah daerah, yayasan, partai publik, dan organisasi nirlaba lainnya adalah contoh jenis entitas yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik di lembaga tinggi Negara. Di Negara Indonesia sendiri *fraud* telah ada, salah satunya di bidang akuntansi yang beroperasi di sektor publik. Dapat mengancam tatanan manajemen yang telah dibangun oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola perusahaannya (Fauziyah & Setyawan, 2023).

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan, laporan keuangan instansi pemerintah diterapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi, pertanggungjawaban melalui tujuan, fungsi dan objek pengeluaran (Siska Septiani *et al.*, 2022)

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan. (Kuntadi *et al.*, 2023) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Dan Moralitas Terhadap Pencegahan Fraud Hasil analisis data memanfaatkan SPSS 29 menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengendalian internal memiliki pengaruh akan pencegahan fraud. Kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh akan pencegahan fraud. Moralitas memiliki pengaruh akan pencegahan fraud.

Penelitian dari (Sari *et al.*, 2024), Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud laporan keuangan dan untuk variabel kualitas aparatur pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap Fraud Triangel.

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). Penelitian ini merupakan review dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian (Sari *et al.*, 2024). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek

penelitiannya pada Kota Pekalongan dan penelitiannya dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian ini menggunakan Objek pada Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Alasan penelitian ini dipilih karena laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik yang harus di susun secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan (*fraud*). Namun, dalam prakteknya masih sering di temukan berbagi kasus penyimpangan dan *fraud* laporan keuangan di sektor publik, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu, kualitas aparatur pemerintah sebagai pihak yang berperan langsung dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan juga sangat menentukan keberhasilan pencegahan *fraud*. Aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang baik di terapkan mampu menerapkan standar akuntansi sektor publik secara benar serta meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting di lakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan, sehingga hasil penelitian di herapkan sapat memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, membuat peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTASI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* LAPORAN**

KEUANGAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir?
2. Apakah kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir?
3. Apakah penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh secara Simultan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- a. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- b. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- c. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Penerapan akuntansi sektor publik

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal (Siska Septiani *et al.*, 2022)

b. kualitas aparatur pemerintah

Pengertian kualitas adalah Kesesuaian dengan standar diukur dengan menghitung tingkat ketidaksesuaian dan pemeriksaan. Pengertian aparatur pemerintah adalah Pekerja yang digaji pemerintah melakukan tugas teknis pemerintah dan melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nada, 2024).

c. pencegahan *fraud* laporan keuangan

Kecurangan ataupun fraud ialah sesuatu perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi, dengan iktikad buat memperoleh keuntungan orang ataupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Mashitoh *et al.*, 2024)

2. Manfaat praktis

Adapun penelitian ini di lakukan dengan harapan bermanfaat bagi:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui lebih tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir).

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna dalam meningkatkan tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir).

c. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sudah ada hubungannya dengan penelitian ini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran terutama mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir).

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* menggambarkan bahwa ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat di capai dengan cara *maksimalisasi utilitas principals* dan menejemen. Teori *Stewardship* dapat di terapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan non *prosif* lain nya (Khairan *et al.*, 2024).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah antara lain, dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevancy*), andal (*reliability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila pemerintah mampu menerapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas seperti disyaratkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berbasis akrual yang merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Sari *et al.*, 2024)

2.1.2 Teori dan Standar Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang didalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Menurut (Santoso & Pambelum, 2008) teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu :

- 1) Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (*the ability to explain*),
- 2) Kemampuan untuk memprediksi (*the ability to predict*),
- 3) Kemampuan mengendalikan fenomena (*the ability to control given phenomena*).

Pada dasarnya terdapat tiga tujuan untuk mempelajari teori akuntansi yaitu:

- 1) Untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini,
- 2) Mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang saat ini dilakukan
- 3) Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang.

Pengembangan teori sektor publik untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan (reliable). Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang

relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan, dan materialistic (Santoso & Pambelum, 2008).

Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah benar ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Siska Septiani *et al.*, 2022). Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Saat ini di Indonesia telah memasuki era baru pengembangan akuntansi pemerintah yaitu penggunaan basis akrual dalam akuntansi nya Indikator akuntansi sektor publik adalah : andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Khairan *et al.*, 2024)

2.1.4 Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Siska Septiani et al., 2022).

2.1.5 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntansi pemerintah dan akuntansi sosial (Gurendrawati *et al.*, 2024).

1) Akuntansi Pemerintah

Akuntansi publik atau akuntansi pemerintah adalah suatu data akuntansi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan kepada lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan menjadi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, akuntansi pemerintah daerah ditujukan kepada akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/ kota.

2) Akuntansi Sosial

Berbeda dengan akuntansi publik, akuntansi sosial merupakan cabang akuntansi khusus untuk organisasi, seperti organisasi makro yang melayani

perekonomian nasional. Akuntansi sosial berguna dalam mencatat aktivitas ekonomi organisasi nonlaba yang mencakup pusat kesehatan, masjid, partai politik, rumah sakit, dan lain-lain.

2.1.6 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Karakteristik serta pelaporan keuangan akuntansi sektor publik dapat dipengaruhi oleh kegiatan operasional organisasi, khususnya dalam pemerintahan. Untuk menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut (Gurendrawati et al., 2024).

a) Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang Diberikan

- 1) Suatu bentuk umum dari pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Desentralisasi adalah pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk memantau dan menjaga keseimbangan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan di kalangan pengelola pemerintahan.
- 2) Dalam sistem pemerintahan sendiri. Pada dasarnya, terdapat tiga bidang pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintahan yang lebih luas memberikan arahan kepada pemerintahan yang lebih sempit.
- 3) Pengaruh proses politik. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah berupaya mencapai keseimbangan fiskal dengan menjaga kemampuan keuangan daerah dari penerimaan pajak dan sumber lain untuk memenuhi keinginan masyarakat.

4) Hubungan pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah. Walaupun dalam beberapa kasus pemerintah daerah memungut langsung biaya pelayanan yang diberikan, sebagian besar pendapatan pemerintah daerah berasal dari pemungutan pajak yang merupakan bagian dari pemberian biaya pelayanan masyarakat.

b) Keuangan Pemerintah Daerah yang Penting untuk Diawasi

1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, tujuan keuangan, dan alat pengendalian. Anggaran pemerintah daerah adalah dokumen formal yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Anggaran pemerintah daerah digunakan sebagai penentu langkah-langkah yang berkaitan dengan ketetapan pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dan harapan pendapatan.

2) Berinvestasi pada aset-aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah daerah menginvestasikan uang dalam jumlah besar pada aset-aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan cagar alam.

3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Akuntansi dana adalah suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang umum diterapkan di lingkungan pemerintah daerah.

2.1.7 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik dan Perkembangannya

Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan

universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan (Gurendrawati *et al.*, 2024)

2.1.8 Kualitas Aparatur Pemerintah

2.1.9 Teori Dan Definisi Kualitas Aparatur Pemerintah

Pengertian kualitas adalah Kesesuaian dengan standar diukur dengan menghitung tingkat ketidaksesuaian dan pemeriksaan. Pengertian aparatur pemerintah adalah Pekerja yang digaji pemerintah melakukan tugas teknis pemerintah dan melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian aparatur pemerintah daerah adalah semua perangkat daerah yang menangani urusan rumah tangga dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas dan fungsi utamanya secara menyeluruh adalah yang dimaksud dengan kualitas aparatur daerah. Kompetensi ASN di bidang akuntansi (keuangan) memungkinkan ASN yang profesional untuk memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, sehingga laporan tersebut dapat memenuhi kualifikasi informasi yang bermanfaat (Nada, 2024).

Indikator untuk menilai kompetensi aparatur menurut (Nada, 2024) yaitu:

- a. Pengetahuan: kesadaran dalam domain kognitif. Seorang karyawan, misalnya mengetahui cara mengidentifikasi belajar dan melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
- b. Pemahaman ke dalam kapasitas kognitif dan afektif seseorang. Seorang karyawan, misalnya, harus memahami karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien untuk melakukan pembelajaran.
- c. Kemampuan: Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat menyelesaikan tugas atau tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Nilai: suatu norma perilaku yang diyakini dan ditanamkan dalam pikiran seseorang. Sikap (Attitude). Perasaan (senang tidak senang, suka tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- e. Kecenderungan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti melakukan tugas.

2.1.10 Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan.

Kecurangan ataupun fraud ialah sesuatu perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh orang-orang dari dalam ataupun luar organisasi, dengan iktikad buat memperoleh keuntungan orang ataupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Dalam lingkup akuntansi fraud ialah penyimpangan dari prosedur akuntansi yang sepatutnya diterapkan dalam suatu entitas. Kecurangan ataupun fraud dicoba secara terencana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan dalam sesuatu industri dapat dicoba oleh segala pihak yang turut dan dalam industri tersebut. Tidak hanya pemegang kekuasaan namun para

pegawai lapisan bawah dapat pula melakukan suatu aksi kecurangan (Mashitoh et al., 2024).

Secara umum, kecurangan (*fraud*) dapat dibagi menjadi tiga kategori: penyelewengan aset, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi. Teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey, menyatakan bahwa ada tiga penyebab dasar penipuan: faktor tekanan, faktor peluang, dan pertimbangan rasionalisasi. Selain Teori *Fraud Triangle*, ada juga teori *Fraud Diamond* yang memperluas *Fraud Triangle* dengan menambahkan aspek kausal kedua yang disebut kapabilitas. Prinsip sentral teori ini adalah bahwa dua kelompok kekuatan, yaitu elemen internal dalam bentuk kapabilitas dan rasionalisasi dan faktor eksternal dalam bentuk tekanan dan kesempatan dapat menimbulkan kecurangan (*fraud*). *Fraud* dapat dipecah menjadi tiga kategori perilaku, yaitu (Fauziyah & Setyawan, 2023).

- 1) Penyalahgunaan aset, adalah jenis *fraud* yang paling sederhana untuk diidentifikasi karena melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset sehingga kerusakan yang ditimbulkan akibat *fraud* dapat diukur atau diperkirakan.
- 2) Pernyataan palsu, ketika rekayasa keuangan digunakan untuk menggambarkan laporan keuangan perusahaan untuk menyembunyikan situasi keuangannya yang sebenarnya
- 3) Korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang sulit dideteksi karena dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam jaringan yang terorganisir dan metodis. *Fraud* jenis ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah, sehingga banyak pihak yang masih belum menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang solid. *Fraud*

dapat berkembang sebagai akibat dari tiga penyebab utama, menurut teori *fraud triangle* Donald R. Cressey: tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Fauziah & Setyawan, 2023).

a) Tekanan (*Pressure*)

Seseorang dapat melakukan *fraud* karena tekanan dari faktor luar (eksternal). Tekanan ini bisa berasal dari beberapa hal, seperti tekanan dari tempat kerja, tekanan keuangan, tekanan dari perilaku yang tidak sehat, dan tekanan lainnya.

b) Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor eksternal yang disebut peluang dapat menginspirasi atau mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Faktor ini biasanya masuk persamaan ketika ada sistem kontrol yang tergolong lemah, seperti kurangnya pemantauan atau audit yang memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

c) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Komponen ketiga ini adalah hasil dari keyakinan internal individu bahwa perilaku *fraud* itu rasional dan dapat diterima secara moral.

2.1.11 Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* dikemukakan oleh Wolfe and Hermanson (2004) dengan menambahkan tiga faktor penyebab terjadinya kecurangan akuntansi yang ditemukan Cressey (1953) yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dengan faktor kemampuan (*capability*).

Terdapat tiga faktor yang mendorong terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu:

1. Tekanan (*pressure*) yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan yang mencakup gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan hal-hal lainnya baik bersifat keuangan dan non keuangan yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tekanan dalam organisasi muncul karena kebutuhan yang tidak tercukupi dari kompensasi yang diberikan.
2. Kesempatan (*opportunity*) yakni situasi yang memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan. Kesempatan terjadinya kecurangan dalam organisasi dikarenakan lemahnya pengendalian internal sebagai pendeteksi kecurangan. Meningkatnya kesempatan dalam kecurangan dikarenakan kegagalan organisasi dalam menetapkan prosedur dan kontrol yang memadai untuk mendeteksi adanya aktivitas kecurangan.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) yaitu sikap, karakter, nilai-nilai etis yang memperbolehkan individu-individu tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Rasionalisasi juga disebut dengan pembenaran atas tindakan yang mengandung kecurangan. pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan pegawai karena ketidakpuasan atas kompensasi yang diperoleh.

Wolfe and Hermanson (2004) mengungkapkan bahwa kasus kecurangan tidak akan terjadi tanpa dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan kecurangan tersebut. Sifat-sifat yang berkaitan dengan faktor kemampuan (*capability*) adalah sebagai berikut:

a. *Positioning*

Seseorang yang memiliki jabatan atau posisi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan.

b. *Brains*

Seseorang yang memiliki kemampuan dan pemahaman untuk mengambil keuntungan dari kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, jabatan atau otoritas untuk memaksimalkan keuntungan.

c. *Confidence / Ego*

Seseorang yang melakukan kecurangan harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan agar tindakannya tidak dapat dideteksi.

d. *Coercion Skill*

Seseorang yang melakukan kecurangan memiliki kemampuan untuk memaksa orang lain agar menyembunyikan tindakan kecurangan yang telah dilakukan.

e. *Effective lying,*

Seseorang yang berhasil melakukan kecurangan membutuhkan kebohongan yang efektif dan merekayasa fakta agar tidak mudah dideteksi.

f. *Immunity to stress*

Seseorang yang melakukan kecurangan harus mampu mengendalikan stress dan menyembunyikan tindakannya agar tidak menimbulkan stress.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
1	Fangela Myas Sari , Anni Safitri , Aria Elshifa	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kota Pekalongan). Journal of Social and Policy Issues E-ISSN: 2807-3843 I P-ISSN: 2829-8632 https://doi.org/10.58835/jspi.v4i2.331	Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah Pencegahan <i>Fraud</i> Laporan Keuangan	Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tingginya tingkat penerapan SAP dan baiknya Penerapan SAP maka dapat mencegah terjadinya a pencegahan <i>Fraud</i> laporan keuangan hal ini dikarenakan suatu penerapan SAP yang mengikuti aturan dari maka akan mempengaruhi pencegahan <i>fraud</i> . Dan untuk variabel kualitas aparatur pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap <i>Fraud Triangel</i> . Ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pemerintah di kota Pekalongan untuk posisi dan jabatannya sudah diterapkan dengan baik untuk mencegah <i>Fraud</i> . Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, hasilnya masih memiliki

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
				kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Saran-saran ini termasuk penelitian menggunakan metode lain seperti wawancara, memperluas objek penelitian, dan menambahkan variabel seperti variabel profesional kerja, SPI (Sistem Pengendalian Internal) yang mungkin mempengaruhi <i>Fraud Triangel</i> .
2	Ulfiatul Khairan Ikhyanuddin Murhaban. Rayyan Firdaus	Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara). JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALAH <i>https://ojs.unimal.ac.id/jam DOI</i>	Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pencegahan <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 akuntansi sektor publik memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan fraud pada daerah kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Dampak Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud (Studi

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
		:10.29103/jam.v%vi%i.10689 <i>JAM, Volume 2, No 3, September 2023</i> ISSN : 2962-6927 https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10689		Kasus Kabupaten Aceh Utara), maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntansi sektor publik berdampak signifikan terhadap pencegahan fraud di pemerintahan aceh utara dan Secara parsial akuntabilitas kinerja instansi berdampak positif terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintahan an Aceh Utara.
3	Indri Yunistasia Tamambali, Margaretha E.J Wagev, Abdul Rahman Taher	Pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern Pemerintah dan kompetensi aparatur desa Terhadap pencegahan <i>fraud</i> (studi pada desa sedoa kecamatan lore utara). https://jurnalazislamadjido.ac.id/index.php/JERAM/article/view/182	Efektivitas sistem pengendalian intern Pemerintah, kompetensi aparatur desa, pencegahan <i>fraud</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$; 2) efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial dan signifikan

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
				berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara dengan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$; 3) kompetensi aparatur desa secara parsial dan signifikan terhadap pencegahan fraud di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara dengan nilai signifikansi sebesar $0,017 < 0,05$.
4	Azalia kitasha asril, taufeni taufik, sem paulus silalahi	Pengaruh penerapan sistem pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan moralitas terhadap pencegahan <i>fraud</i> (studi empiris pada desa di kecamatan siulak kabupaten kerinci). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha Vol : 15 No:04:2024	penerapan sistem pengendalian Internal, kompetensi aparatur, dan moralitas pencegahan <i>fraud</i>	Hasil analisis data memanfaatkan SPSS 29 menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pengendalian internal memiliki pengaruh akan pencegahan <i>fraud</i> . Kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh akan pencegahan <i>fraud</i> . Moralitas memiliki pengaruh akan pencegahan <i>fraud</i> .

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
		https://doi.org/10.23887/jimat.v1i04.78903		
5	Lathifah Nur'aini, Salza Adzri Arismutia	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, <i>Whistleblowing System</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Pada Inspektorat Daerah Kota Bandung). P-issn 2622-4291 E-issn 2622-4305 volume 6, nomor 3, april 2024 Eco-buss Jejak artikel: Unggah: 17 maret 2024; Revisi: 22 maret 2024; Diterima: 27 maret 2024; Tersedia online: 10 april 2024 https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1200	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, <i>Whistleblowing System</i> , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pencegahan <i>Fraud</i>	Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah Inspektorat Daerah Kota Bandung, Tindakan kepemimpinan dapat meningkatkan pencegahan kecurangan karena Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki dampak yang besar. Karena manfaat besar dari pelaporan pelanggaran, sistem pelaporan yang lebih kuat dapat membantu mencegah kecurangan. Karena kompetensi SDM tidak signifikan secara statistik, kompetensi SDM tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan. Kata kunci: kompetensi SDM, pengendalian intern

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul dan Identitas jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil penelitian
				pemerintah, dan sistem <i>whistleblowing system</i> bekerja sama untuk mencegah kecurangan. Kecurangan dapat dicegah sebesar 74% oleh pengendalian internal pemerintah, 26% oleh variabel eksternal, dan 74% oleh sistem pelaporan pelanggaran dan kompetensi sumber daya manusia

<https://scholar.google.co.id/>

2.3 Kerangka Pemikiran

Penerapan akuntansi sektor publik adalah penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja instansi pemerintah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah dapat optimal Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban

mengenai tujuan, fungsi dan obyek pengeluaran (Siska Septiani *et al.*, 2022). Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok kinerja yang telah Tolok ukur kinerja yang ditetapkan tersebut dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Salah satu tolok ukur kinerja non keuangan yang perlu menjadi perhatian adalah kinerja sumber daya manusia (Hidayat *et al.*, 2021).

Pencegahan kecurangan sebagai penggunaan control pencegahan, seperti aturan, proses, pelatihan, dan komunikasi, untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meskipun mungkin tidak memberikan jaminan 100% terhadap kecurangan, tindakan pencegahan merupakan garis pertahanan pertama yang penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (Nur'aini & Arismutia, 2024). Kecurangan ataupun fraud ialah sesuatu perbuatan melawan hukum yang dicoba oleh orang- orang dari dalam ataupun luar organisasi, dengan iktikad buat memperoleh keuntungan orang ataupun kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Mashitoh *et al.*, 2024)

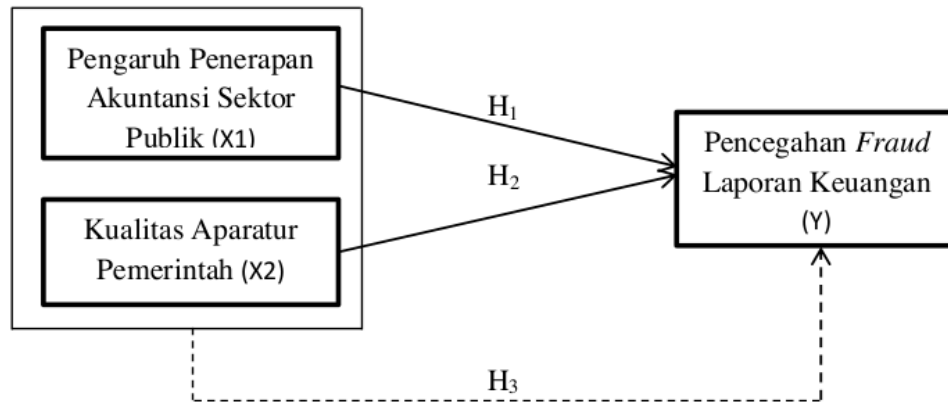
Penerapan akuntansi sektor publik memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem akuntansi yang baik membantu pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan standar akuntansi sektor publik (SAP) yang tepat, laporan keuangan daerah dapat menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga meminimalkan peluang terjadinya kecurangan atau fraud. Semakin baik

penerapan akuntansi sektor publik, semakin kecil kemungkinan penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah.

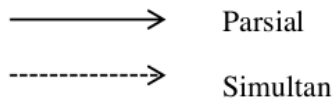
Selain itu, kualitas aparatur pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya fraud pada laporan keuangan. Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi akan lebih mampu menjalankan tugas sesuai peraturan dan etika profesi. Aparatur dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi akan cenderung bersikap jujur dan profesional dalam mengelola anggaran publik. Sebaliknya, rendahnya kualitas aparatur dapat membuka peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan, baik karena ketidaktahuan maupun karena adanya niat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hubungan antara penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah terhadap pencegahan fraud laporan keuangan dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik akan menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif, sementara kualitas aparatur pemerintah menjadi pelaku utama dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Kombinasi antara sistem akuntansi yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas akan memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik penerapan akuntansi sektor publik dan semakin tinggi kualitas aparatur pemerintah, maka upaya pencegahan fraud laporan keuangan di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, akan semakin efektif.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



Keterangan:



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat takterduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan telaah teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H_1 : penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangnn pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- H_2 : kualitas aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.
- H_3 : penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* laporan keuangnn pada pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif (*causal comparative research*) didefinisikan suatu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, alisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2022). Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen yakni penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas aparatur pemerintah. Sedangkan variabel devenden nya yaitu pencegahan fraud laporan keuangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah kabupaten indragiri hilir. Waktu penelitian di lakukan selama 3 bulan dihitung dari Januari sampai Maret tahun 2026.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang akan diteliti. Dalam hal ini populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan jumlah 26 Organisasi Perangkat Daerah (Sumber data : Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025)

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aparatur pemerintah di bagian keuangan yang menduduki jabatan seperti kepala dinas, kepala bagian, dan kepala sub bagian.
2. Pegawai yang turut serta secara langsung dalam penyusunan anggaran dan yang terlibat dalam pelaporan keuangan di pemerintah kabupaten indragiri hilir yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun.
3. Jumlah sampel sebanyak 78.

3.4 Prosedur Dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian tanpa melalui perantara, artinya peneliti terjun sendiri ke lapangan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variable penelitian, dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan kuesioner (Sulung & Muspawi, 2024)

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Pimpinan dan Pimpinan Divisi pada pemerintah kabupaten indragiri hilir memperoleh data yaitu penelitian menyebarkan kuesioner pada pemerintah kabupaten indragiri hilir yang di jadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Kemudian dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian dari 1 sampai 5 skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*.

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu variabel independen 1 (penerapan akuntansi sektor publik), variabel independen 2 (kualitas aparatur pemerintah), dan variabel dependen (pencegahan *fraud* laporan keuangan).

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

3.5.2 Pencegahan *fraud* Laporan Keuangan (Y)

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja dengan itikad yang tidak baik, dengan melakukan penyajian yang salah atas laporan keuangan atau

mengungkapkan dan pernyataan yang salah karena ketidak tepatan aktiva. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud laporan keuangan, yaitu adanya penerapan akuntansi sektor public, yaitu merupakan teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal (Fachrurroji, 2020).

Fraud atau kecurangan adalah suatu pengertian umum yang mencakup beragam cara yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari orang melalui cara yang tidak benar. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja umumnya dalam bentuk kebohongan dan pencurian. Kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan kekayaan atau untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau menghindari pajak serta mengamankan keuntungan pribadi. Kecurangan atau fraud dapat berupa kecurangan dalam laporan keuangan, korupsi penyalahgunaan asset (Khairan et al., 2024). Terdapat 5 indikator pada variable pencegahan *fraud* laporan keuangan:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Adopsi kuesioner untuk variabel penyajian laporan keuangan ini mengacu pada penelitian Fangela Myas Sari, Anni Safitri dan Aria Elshifa (2024) dalam jurnal yang berjudul " Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan" Jumlah

butir pertanyaan pada variabel ini sebanyak 10 item, di mana setiap indikator terdiri dari dua pernyataan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup.

¹ Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Dimana dalam pengukurannya ²⁶ terdiri dari 5 skala, Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

⁵ Tabel 3.1: Skala Pengukuran

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2022

3.5.3 Variabel Independen (X)

¹⁸ 3.5.4 Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Akuntansi sektor publik dapat dikatakan sebagai akuntansi dana masyarakat. Sebab, sektor publik melakukan pencatatan, analisis, serta pelaporan informasi keuangan lembaga publik, seperti sekolah, rumah sakit, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Akuntansi sektor publik pemerintah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam melakukan penyusunan laporan. Hal tersebut sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara entitas publik nonpemerintah harus ²⁸ mengacu pada ISAK 35 sebagai pengganti PSAK 45. Akuntansi sektor publik merupakan praktik akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga publik, seperti lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara/daerah, organisasi publik non pemerintah, dan organisasi publik lainnya. Dengan demikian, akuntansi

sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

⁴ penerapan akuntansi sektor publik adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah berkerja sesuai standar yang berlaku. Siklus akuntansi keuangan sektor publik bisa diukur dengan. Terdapat 5 indikator pada variabel penerapan akuntansi sektor publik yaitu:

1. Kepatuhan terhadap standar akuntansi
2. Transparansi
3. Pencatatan
4. Penyajian
5. Teknologi akuntansi

Adopsi kuesioner untuk variabel penyajian laporan keuangan ini mengacu pada penelitian Fangela Myas Sari, Anni Safitri dan Aria Elshifa (2024) dalam jurnal yang berjudul " Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan" Jumlah butir pertanyaan pada variabel ini sebanyak 10 item, di mana setiap indikator terdiri dari dua pernyataan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup.

¹ Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Dimana dalam pengukurannya ²⁶ terdiri dari 5 skala, Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

5

Tabel 3.2: Skala Pengukuran

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2022.

3.5.5 Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)

22

Kualitas Pelayanan Publik Evaluasi kualitas pelayanan atau pelayanan publik merupakan hal yang kompleks dan sulit dilaksanakan dibandingkan dengan evaluasi kualitas aparatur pemerintahan, meskipun sulit untuk diukur, bukan berarti kualitas pelayanan atau pelayanan publik tidak dapat diukur. Kriteria penilaian kualitas pelayanan atau pelayanan publik yang paling penting saat ini banyak diteliti dan dipublikasikan oleh lembaga penelitian dan para ahli. Terdapat 5 indikator pada variable Kualitas aparatur pemerintah:

1. Kompetensi
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Pengembangan professional

Adopsi kuesioner untuk variabel penyajian laporan keuangan ini mengacu pada penelitian Fangela Myas Sari, Anni Safitri dan Aria Elshifa (2024) dalam jurnal yang berjudul " Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* Laporan Keuangan" Jumlah butir pertanyaan pada variabel ini sebanyak 10 item, di mana setiap indikator terdiri dari dua pernyataan yang disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup.

¹ Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert*. Dimana dalam pengukurannya ²⁶ terdiri dari 5 skala, Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2022).

⁵ Tabel 3.3: Skala Pengukuran

Skala	Keterangan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2022.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Dalam tahap-tahap analisa data yang digunakan untuk mengukur kebenaran dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, distribusi jawaban responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 27 (Sugiyono, 2022). Metodologi analisis yang sistematis ini berperan penting dalam memastikan hasil penelitian.

3.6.1 Statistik Deskriptif

¹⁰ Statistik deskriptif adalah suatu bentuk analiis yng digunakan untuk mendeskripsikan data. Sedangkan deskriptif diartikan sebagai cara untuk mendiskripsikan keseluruhan variabel-variabel yang dipilih dengan cara mengkalkulasi data sesuai kebutuhan peneliti. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Statistik deskriptif yang dijelaskan pada bab ini adalah analisis

deskriptif yang dihasilkan dari olah data statistik dengan menggunakan software SPSS (Danar Paramita ⁵ *et al.*, 2021)

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.3 ⁴ Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap data penelitian yang didapat dari data primen atau hasil angket yang disampaikan kepada responden. Hasil tersebut diberikan skor nilai. Terhadap hasil dari skor nilai tersebut dilakukan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid dan menguji konsistensi butir-butir pertanyaan sehingga dapat menggambarkan indikator yang diteliti

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat yaitu korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. Jika masing-masing butir pertanyaan merupakan indikator pengukur variabel maka akan memiliki nilai korelasi yang tinggi. ² Jika nilai validitas corrected item total correlation setiap pertanyaan lebih besar dari 0,3 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid (Purba *et al.*, 2021).

3.6.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan terhadap data primer yang didapat dari hasil angket. Untuk melihat kehandalan data tersebut maka dilakukan uji reliabilitas. Kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang pada sampel yang berbeda dan apabila hasil yang didapat relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabel). Sebaliknya

bila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh tidak konsisten dengan hasil sebelumnya maka alat ukur tersebut dianggap tidak reliabel. Data reliabel didapat nilai koefisien alpha (cronbach alpha) > 0,60 maka angket tersebut dinyatakan reliabel (Purba *et al.*, 2021).

3.6.5 Uji Asumsi Klasik

Uji⁵⁷ asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis, untuk memastikan apakah persamaan pada model regresi dapat diterima secara ekonometrika. Pengujian³⁰ asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (Purba *et al.*, 2021).

3.6.6 Uji Normalitas

Untuk mendapatkan hasil yang valid dari uji asumsi klasik, maka perlu diketahui apakah data tersebut sudah berdistribusi normal. Beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi normal yaitu dengan uji Kolmogorov-smirnov, uji Histogram dan uji Probability Plot (Purba *et al.*, 2021).

⁹ Data berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-smirnov adalah jika hasil pengujian didapat nilai $\text{asympt.sig (2-tailed)} > 0,05$, data berdistribusi normal berdasarkan uji Histogram adalah jika hasil pengujian didapat sebuah grafik histogram berbentuk lonceng sempurna sedangkan data normal menurut uji Probability Plot adalah jika hasil pengujian data¹⁴ atau didapat titik-titik menyebar sepanjang garis diagonal (Purba *et al.*, 2021). Sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Data tidak berdistribusi normal.

H_1 : Data ber distribusi normal

3.6.7 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel-variabel bebas adalah dengan melakukan uji multikolinearitas. Jika berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapat nilai Tolerance > 0,01 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas (Purba *et al.*, 2021).⁹ Sehingga dirumuskan hipotesis dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

H₀: Model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

H₁: Model regresi terjadi multikolinearitas.

3.6.8 Uji Heterokedastisitas

¹⁹ Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dilakukan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji scatter plot dan uji glesjer (Purba *et al.*, 2021).

⁷ Berdasarkan hasil uji scatter plot jika didapat titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola maka disimpulkan tidak terjadi kesamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika hasil uji glesjer didapat hasil nilai signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan pada model regresi tidak terjadi kesamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Purba *et al.*, 2021). Sehingga dirumuskan hipotesis dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

H₀: Model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas

H₁: Model regresi terjadi heteroskedastisitas

3.6.9 Uji Hipotesa

3.6.10 Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat (Purba et al., 2021). Beberapa pengaruh yang dihasilkan dari hasil pengolahan data 1) pengaruh positif dan signifikan 2) pengaruh positif dan tidak signifikan 3) pengaruh negatif dan signifikan serta 4) pengaruh negatif dan tidak signifikan. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut (dengan asumsi 5 buah variabel bebas dan 1 variabel terikat):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Y = Kecenderungan Kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Penerapan Akuntansi Sektor Publik

X_2 = Kualitas Aparatur Pemerintah

ϵ = Error (tingkat kesalahan)

3.6.11 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini. Menurut (Purba et al., 2021). dasar pengambilan keputusan dalam uji adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Sebaliknya, jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.12 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak atau tidak untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Menurut (Purba *et al.*, 2021). Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

1. Jika nilai F hitung $> F$ tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Sebaliknya, jika nilai F hitung $< F$ tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.6.13 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, atau dalam bentuk persentase antara 0% hingga 100%. Semakin besar nilai R^2 , semakin besar pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (Purba *et al.*, 2021).

Jika nilai R^2 mendekati 1, berarti hampir seluruh variasi yang terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati 0, maka variabel bebas hanya mampu menjelaskan sebagian kecil

variasi pada variabel terikat. Dalam penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, biasanya digunakan Adjusted R Square, yaitu nilai R^2 yang sudah disesuaikan agar tidak menimbulkan bias akibat penambahan jumlah variable bebas (Purba *et al.*, 2021).

HASIL PENELITIAN

2.4 Gambaran Umum Objek Penelitian

¹ Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana pada penyebutan atau istilah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah secara resmi menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Barulah berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2017 menegaskan kembali sebutan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini selaku pengguna anggaran ⁵⁶ yang bertanggung jawab penuh dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan berkualitas. Mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 terkait Otonomi Daerah, OPD terdiri dari OPD Provinsi dan OPD Kabupaten dimana OPD) Provinsi te susun dari Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD, ⁶² Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan untuk OPD Kabupaten tersusun dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

⁸⁹ Berdasarkan data dari Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 jumlah OPD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 26 unit OPD yang terdiri dari 17 Dinas/Instansi dan 20 Kecamatan. Peneliti kemudian menggunakan 26 OPD ⁶¹ yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir untuk diteliti dan menyebarkan 3 buah kuesioner untuk masing-masing OPD sehingga total kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 78 kuesioner. Dari 78 ⁹¹ kuesioner yang dibagikan tersebut terdapat 45 kuesioner yang dikembalikan dan sekitar 33 ⁶⁰ kuesioner yang tidak kembali.

Tabel 4.1 Tempat Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Kuesioner Yang Di Sebar	Kuesioner Yang Kembali
1	Sekretariat Daerah	3	0
2	Sekretariat DPRD	3	0
3	Insepektorat kabupaten indragai hilir	3	0
4	Dinas Pendidikan	3	3
5	Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32	3
6	Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman	3	3
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	3
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Anak dan Perempuan	3	0
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3	0
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	3	0
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3	0
13	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	0
14	Dinas Komunikasi, Informatika, 32 sediaan Dan Statistik	3	3
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	0
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	3
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	3
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3	3
19	Dinas Perikanan	3	17
20	Dinas Pertanian	3	3
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3	3
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	0
23	Badan Pendapatan Daerah	3	3
24	Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber daya Manusia	3	3
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	0
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	3
TOTAL		78	45

Sumber : Data Olahan, 2026

Dari tabel 4.1, dapat dilihat bahwa dari 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disebarkan kuesioner, hanya 15 OPD di Kabupaten Indragiri Hilir yang datanya dapat diolah dalam penelitian ini karena terdapat 45 kuesioner yang telah dikembalikan. Sedangkan 11 OPD datanya tidak dapat diolah karena sejumlah 33 kuesioner tidak dikembalikan.

51

Tabel 4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Data	Persentase
Jumlah Kuesioner yang di kirim	78	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	33	43%
Jumlah kuesioner yang kembali	45	58%

Sumber : Data Olahan, 2026

Dari tabel 4.2, dapat dilihat bahwa peneliti telah menyebarkan sebanyak 78% kuesioner, dimana terdapat 33 kuesioner atau setara dengan 43% dari total persentase kuesioner yang tidak dikembalikan. Sedangkan 45 kuesioner dapat diolah yang berarti tingkat pengembalian dari kuesioner yang telah dibagikan sebesar 70%.

1

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan angket pertanyaan (kuesioner) yang disebarkan secara langsung kepada responden di 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian keuangan yang tentunya melaksanakan fungsi atau tanggung jawabnya terkait penyusunan laporan keuangan pada masing-masing OPD tersebut. Sedangkan untuk karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan Masa Jabatan. Adapun rincian deskripsi dari responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

16

16

63

Tabel 4.3 Demografi Responden

No	Data	Jumlah Responden	Persentase
1	Usia	45	100%
	20-30 Tahun	2	5%
	31-40 Tahun	22	49%
	41-50 Tahun	16	36%
	>50 Tahun	5	12%
2	Jenis Kelamin	45	100%
	Laki-Laki	23	50%
	Perempuan	22	48%
3	Jenjang Pendidikan	45	100%
	S-2	7	16%
	S-1	27	60%
	Diploma	5	12%
	SMA	6	14%
4	Masa Kerja	45	100%
	1-5 Tahun	9	20%
	6-10 Tahun	9	20%
	>10 tahun	27	60%

Sumber : Data Primer Yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat demografi dari responden pada sisi usia terdapat sebanyak 2 responden atau setara (5%) yang berada di rentang usia 20-30 tahun, kemudian sebanyak 22 responden atau setara (49%) yang berada di rentang usia 31-40 tahun, kemudian sebanyak 16 responden atau setara (36%) yang berada di rentang usia 41-50 tahun, dan 5 responden atau setara (12%) yang berada di rentang usia diatas 50 tahun. Hal ini bisa diartikan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini kepala dinas, kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian keuangan masih berada dalam usia produktif.

Sedangkan jenis kelamin dari masing-masing responden lebih didominasi perempuan dengan jumlah 22 responden atau sebesar (48%) dan laki-laki hanya berkisar 23 responden atau sebesar (50%). Dilihat dari segi jenjang pendidikan, kebanyakan responden memiliki jenjang pendidikan terakhir di Sarjana (S1) sebanyak 27 responden atau sekitar (60%), kemudian Diploma (D3) sebanyak 5

responden atau sekitar (12%). kemudian Master (S2) sebanyak 7 responden atau sekitar (16%) dan sisanya adalah SMA/SMK sebanyak 6 responden atau sekitar (14%). Sedangkan untuk masa jabatan dari para responden memiliki pengalaman pada jabatannya selama lebih dari 10 tahun adalah ¹⁷ sebanyak 27 responden atau sekitar (60%), kemudian yang memiliki masa jabatan atau pengalaman selama 1-5 ⁹⁷ tahun adalah sebanyak 9 responden atau sekitar (20%), kemudian yang memiliki masa jabatan atau pengalaman selama 6-10 tahun adalah ¹⁷ sebanyak 9 responden atau sekitar (20%) ²¹ dan tidak ada satupun responden yang memiliki masa jabatan atau pengalaman dibawah 1 tahun.

2.5 Hasil Penelitian

2.5.7 Statistik Deskriptif

¹⁰ Statistik deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Sedangkan deskriptif diartikan sebagai cara untuk mendiskripsikan keseluruhan variabel-variabel yang dipilih dengan cara mengkalkulasi data sesuai kebutuhan peneliti. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Statistik deskriptif yang dijelaskan pada bab ini adalah analisis deskriptif yang dihasilkan dari olah data statistik dengan menggunakan software SPSS (Danar Paramita *et al.*, 2021)

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	45	39	50	43.93	3.595
Kualitas Aparatur Pemerintah	45	34	50	41.58	2.911
Pencegahan Fraud Laporan Keuangan	45	31	50	43.00	3.814
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 27, 2026)

Dari tabel 4.4, dapat diketahui bahwa jumlah responden (N) yang diolah dalam penelitian ini berjumlah 45 responden. Nilai terendah dari data ditunjukkan oleh skor minimum, sedangkan nilai tertinggi dari data ditunjukkan oleh skormaksimum dalam tabel. Mean digunakan untuk mengukur nilai rata-rata dari data dan standar deviasi menunjukkan simpangan baku.

Variabel Penerapan Akuntansi Sektro Publik (X1) memiliki nilai minimum sebesar 39, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 43.93 dan standar deviasinya sebesar 3.595. Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) memiliki nilai minimum sebesar 34, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 50 dengan nilai rata-rata sebesar 41.58 dan standar deviasinya sebesar 2.911. Variabel Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Y) memiliki nilai sebesar 31, sedangkan nilai maksimumnya senesar 50 dengan nilai rata-rata minimum sebesar 33 rata sebesar 43.00 dan standar deviasinya sebesar 3.814.

2.5.8 Uji Kualitas Data

2.5.8.1 Uji Validitas

Uji validitas Uji validitas dilakukan terhadap data penelitian yang didapat dari data primen atau hasil angket yang disampaikan kepada responden. Hasil

tersebut diberikan skor nilai. Terhadap hasil dari skor nilai tersebut dilakukan uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid dan menguji konsistensi butir-butir pertanyaan sehingga dapat menggambarkan indikator yang diteliti.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat yaitu korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. Jika masing-masing butir pertanyaan merupakan indikator pengukur variabel maka akan memiliki nilai korelasi yang tinggi. Jika nilai validitas corrected item total correlation setiap pertanyaan lebih besar dari 0,3 maka butir pertanyaan dianggap sudah valid (Purba *et al.*, 2021).

23
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Item Pertanyaan	R Hitung	E Tabel	Ket
1	0,784	0,294	Valid
2	0,771	0,294	Valid
3	0,719	0,294	Valid
4	0,809	0,294	Valid
5	0,669	0,294	Valid
6	0,451	0,294	Valid
7	0,750	0,294	Valid
8	0,552	0,294	Valid
9	0,698	0,294	Valid
10	0,775	0,294	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

1
Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik bahwa 10 item pertanyaan yang digunakan memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,294) atau nilai signifikansi $< 0,05$, ini menandakan indikator tersebut valid.

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kualitas Aparatur Pemerintah

Item Pertanyaan	R Hitung	E Tabel	Ket
1	0,661	0,294	Valid
2	0,593	0,294	Valid
3	0,590	0,294	Valid
4	0,734	0,294	Valid
5	0,382	0,294	Valid
6	0,482	0,294	Valid
7	0,663	0,294	Valid
8	0,594	0,294	Valid
9	0,344	0,294	Valid
10	0,654	0,294	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel Kualitas Aparatur Pemerintah bahwa 10 item pertanyaan yang digunakan memiliki $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (0,294) atau nilai signifikansi $< 0,05$, ini menandakan indikator tersebut valid.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Y)

Item Pertanyaan	R Hitung	E Tabel	Ket
1	0,817	0,294	Valid
2	0,648	0,294	Valid
3	0,600	0,294	Valid
4	0,624	0,294	Valid
5	0,618	0,294	Valid
6	0,665	0,294	Valid
7	0,640	0,294	Valid
8	0,543	0,294	Valid
9	0,703	0,294	Valid
10	0,737	0,294	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Dari tabel 4.7 diatas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel Pencegahan Fraud Laporan Keuangan bahwa 10 item pertanyaan yang digunakan memiliki $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} (0,294) atau nilai signifikansi $< 0,05$, ini menandakan indikator tersebut valid.

2.5.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu alat ukur dapat dipercaya. Uji reliabilitas dilakukan terhadap data primer yang didapat dari hasil angket. Untuk melihat kehandalan data tersebut maka dilakukan uji reliabilitas. Kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang pada sampel yang berbeda dan apabila hasil yang didapat relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabel). Sebaliknya bila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil pengukuran yang diperoleh tidak konsisten dengan hasil sebelumnya maka alat ukur tersebut dianggap tidak reliabel. Data reliabel didapat nilai koefisien alpha (cronbach alpha) > 0,60 maka angket tersebut dinyatakan reliabel (Purba *et al.*, 2021).

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Standard	Keterangan
Penerapan Akuntansi sektor Publik	0,881	0,600	Reliabel
Kualitas Aparatur Pemerintah	0,764	0,600	Reliabel
Pencegahan Fraud Laporan Keuangan	0,857	0,600	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

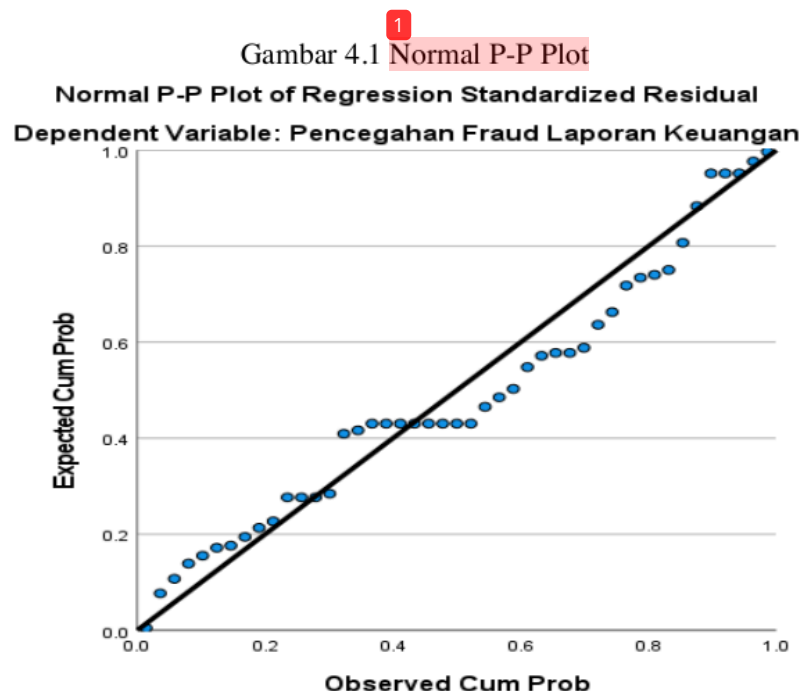
Pada tabel 4.8, menunjukkan nilai Cronbach's Alpha terhadap variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik adalah sebesar (0,881), Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar (0,764) dan Pencegahan Fraud Laporan Keuangan sebesar (0,857). Dari 3 variabel yang diteliti yakni variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah dan Pencegahan Fraud Laporan Keuangan bisa dikatakan reliabel karena memiliki nilai > 0,6.

2.5.9 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis, untuk memastikan apakah persamaan pada model regresi dapat diterima secara ekonometrika. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 27 (Purba *et al.*, 2021).

2.5.9.1 Uji Normalitas

Untuk mendapatkan hasil yang valid dari uji asumsi klasik, maka perlu diketahui apakah data tersebut sudah berdistribusi normal. Beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui apakah data telah berdistribusi normal yaitu dengan uji Kolmogorov-smirnov, uji Histogram dan uji Probability Plot (Purba *et al.*, 2021).

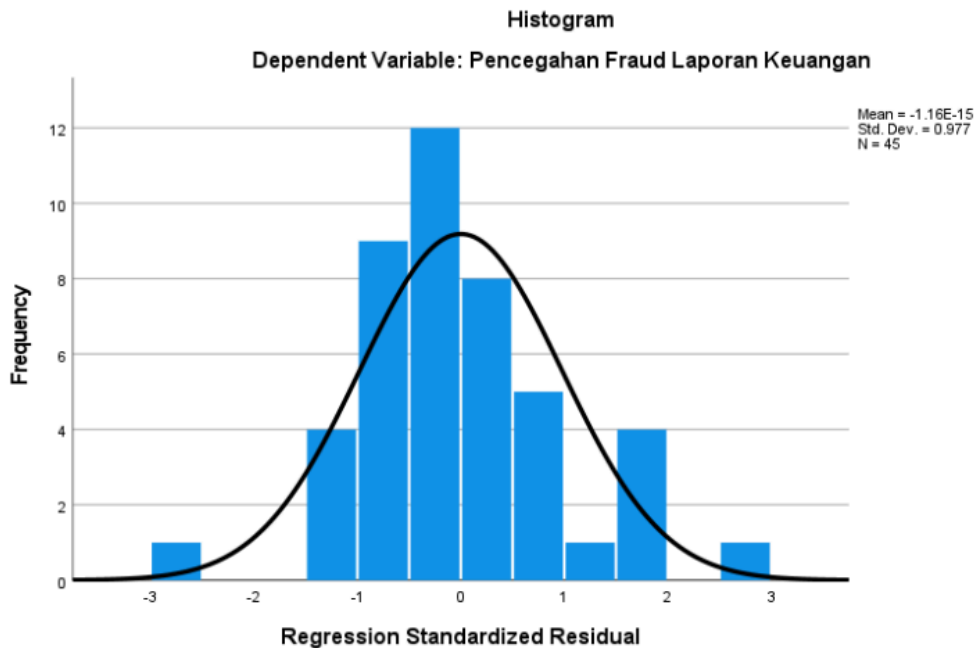


Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat grafik chart Normal Probability Plot P-Pof) menunjukkan bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

80

Gambar 4.2 Grafik Histogram



Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

9

Data berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-smirnov adalah jika hasil pengujian didapat nilai asymp.sig (2-tailed) > 0,05, data berdistribusi normal berdasarkan uji Histogram adalah jika hasil pengujian didapat sebuah grafik histogram berbentuk lonceng sempurna sedangkan data normal menurut uji Probability Plot adalah jika hasil pengujian data ata didapat titik-titik menyebar sepanjang garis diagonal (Purba *et al.*, 2021).

4

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis dari uji normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Data tidak berdistribusi normal.

H_1 : Data ber distribusi normal

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.90636241
Most Extreme Differences	Absolute		.121
	Positive		.121
	Negative		-.096
Test Statistic			.121
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.099
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.101
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.093
		Upper Bound	.108

38

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000

Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa

1

data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi 0,099 artinya lebih besar dari 0,05, maka model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

12

2.5.9.2 Uji Multikolieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel-variabel bebas adalah dengan melakukan uji multikolinearitas. Jika berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapat nilai Tolerance > 0,01 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikolinearitas (Purba *et al.*, 2021).

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	4.761	7.096		.671	.506		
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.453	.138	.427	3.283	.002	.816	1.226
Kualitas Aparatur Pemerintah	.441	.171	.336	2.584	.013	.816	1.226

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* semua variable independen lebih besar dari 0,10 (*tolerance*>0,10) dan nilai VIF (*variance inflation factor*) lebih kecil dari 10,00 (*VIF*<10.00). Nilai *tolerance* Penerapan Akuntansi Sektor Publik sebesar 0,816, Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar 0,816. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas dalam model persamaan regresi di dalam penelitian yang dilakukan ini.

2.5.9.3 Uji Heterokedastisitas

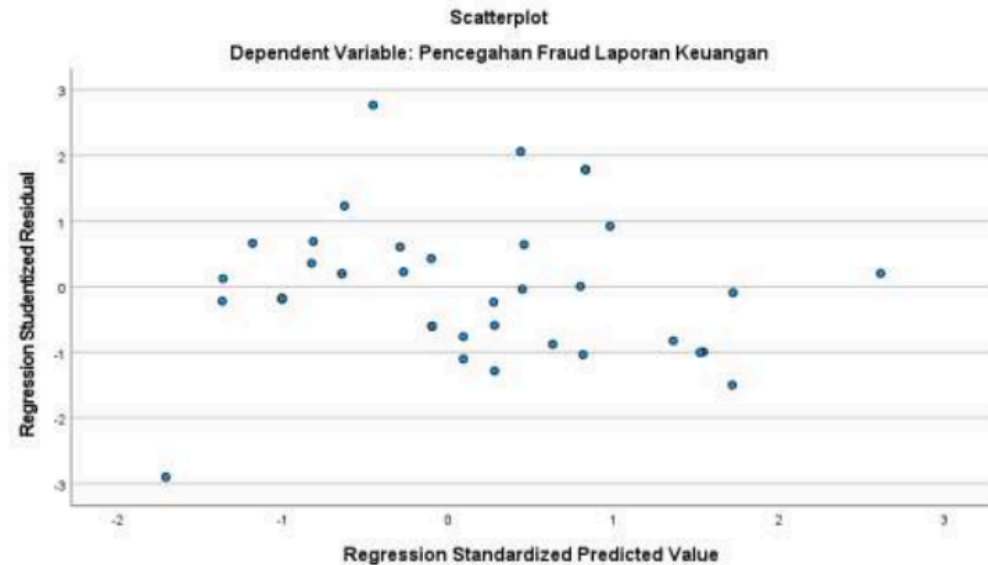
Uji heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dilakukan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara uji scatter plot dan uji glesjer (Purba *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil uji scatter plot jika didapat titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola maka disimpulkan tidak terjadi kesamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika hasil uji glesjer didapat hasil nilai signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan pada model

regresi tidak terjadi kesamaan variance residual dari satu pengamat an ke pengamatan lainnya (Purba *et al.*, 2021).

50

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

3

Berdasarkan gambar 4.2, dapat dilinat bahwa titik-titik menyebar secara acak haik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y can tidak memtentuk suatu pola rertentu. Hal tersebut menandakan tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, seningga data dapat dilanjutkan ke uji berikutnya.

2.5.10 Uji Hipotesa

4.2.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

54

Analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat (Purba *et al.*, 2021).

59

Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	4.761	7.096		.671
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.453	.138	.427	3.283
	Kualitas Aparatur Pemerintah	.441	.171	.336	2.584
					Sig.
					.506
					.002
					.013

50

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

43

Dari tabel 4.11, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,761 + 0,452 X_1 + 0,441 X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui:

1. Nilai konstanta sebesar 4,761 menunjukkan arti bahwa apabila nilai Penerapan Akuntansi sektor Publik (X1). Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) dan Sernilai 0, maka nilai Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Y) sebesar 4,761 satuan.

60

2. Variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik (X1) mempunyai koefesier sebesar 0,452 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari Penerapan Akuntansi sektor Publik (X1) menyebabkan kenaikan pada Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Y sebesar 0,452 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan).

3

3. Variubel Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) mempunyai koefesien sebesar 0,441 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenjikan satu persen Kualitas Aparatur Pemerintah (X2) menyebabkan kenaikan pada Pencegahan Fraud Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,441 dengan asumsi variabel bebas lainrya konstan.

4.2.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini. Menurut (Purba ⁷ *et al.*, 2021). dasar pengambilan keputusan dalam uji adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas T
2. Sebaliknya, jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.761	7.096		.671	.506
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.453	.138	.427	3.283	.002
	Kualitas Aparatur Pemerintah	.441	.171	.336	2.584	.013

a. **Dependent Variable:** Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan (SPSS 27),2026

Dari table 4.12, Variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik memiliki t_{hitung} 3,283 sedangkan t_{tabel} 2,018. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,283>2,018) dengan signifikansi untuk variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik 0,002 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Penerapan Akuntansi sektor Publik berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan.

Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah t_{hitung} 2,584 sedangkan t_{tabel} 2,018. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,584 > 2,018) dengan signifikansi untuk variabel Kualitas

Aparatur Pemerintah 0,013 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan.

4.2.4.3. Uji Simultan (Uji F)¹⁶

Uji simultan atau uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak atau tidak untuk menjelaskan hubungan antarvariabel. Menurut (Purba *et al.*, 2021).²¹ Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah:

1. Jika nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05, maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
2. Sebaliknya, jika nilai F hitung < F tabel dan nilai signifikansi > 0,05, maka secara simultan variabel bebas⁷² tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 4.13 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	268.335	2	134.167	15.162	<.001 ^b
	Residual	371.665	42	8.849		
	Total	640.000	44			

⁷ a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kualitas Aparatur Pemerintah, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

¹ Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Berdasarkan tabel 4.13, maka dapat diketahui hasil ANOVA (analysis of variance) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai F_{hitung} sebesar 15,162 lebih besar dari $F_{tabel} = 3,22$ dan dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variable Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan yang artinya H_3 diterima.

45

4.2.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, atau dalam bentuk persentase antara 0% hingga 100%. Semakin besar nilai R^2 , semakin besar pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (Purba *et al.*, 2021).

42

Jika nilai R^2 mendekati 1, berarti hampir seluruh variasi yang terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 mendekati 0, maka variabel bebas hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi pada variabel terikat. Dalam penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas, biasanya digunakan Adjusted R Square, yaitu nilai R^2 yang sudah disesuaikan agar tidak menimbulkan bias akibat penambahan jumlah variable bebas (Purba *et al.*, 2021).

58

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.648 ^a	.419	.392	2.975	.419	15.162	2	42	<.001

a. Predictors: (*Constant*), Kualitas Aparatur Pemerintah, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

¹ Sumber : Data Olahan SPSS Versi 27, 2026

Dari tabel 4.14, menunjukkan hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,419 artinya adalah bahwa terdapat sebanyak 41,9% pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan atau diteliti dalam penelitian.

2.6 Pembahasan

2.6.7 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, Variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat di lihat berdasarkan nilai t_{hitung} 3,283 sedangkan t_{tabel} 2,018. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,283 > 2,018$) dengan signifikansi untuk variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik 0,002 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_1 diterima.

penerapan akuntansi sektor publik yang baik mencerminkan adanya sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Implementasi standar akuntansi yang

tepat, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mampu meningkatkan kualitas informasi ¹⁷ keuangan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang berkualitas akan memudahkan proses pengawasan serta mengurangi peluang terjadinya manipulasi atau kecurangan ³⁷ dalam penyusunan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini ⁴⁷ mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publik dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap fraud laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya prosedur dan mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Dengan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, potensi terjadinya kesalahan maupun kecurangan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ulfiatul khiran ikhyanuddin dan Rayyan Firdaus, ⁶ menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik memiliki dampak signifikan terhadap pencegahan Fraud laporan keuangan.

Selain itu, penerapan ³⁹ akuntansi sektor publik juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi keuangan secara terbuka, sehingga setiap aktivitas keuangan dapat diawasi secara lebih efektif. Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelola. ⁶⁸ Kedua prinsip ini merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dalam mencegah terjadinya fraud.

Temuan ³⁷ ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik dapat menekan tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi yang memadai ³⁷ tidak hanya

berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu terus meningkatkan kualitas penerapan akuntansi melalui pelatihan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan fraud laporan keuangan. Semakin efektif penerapan akuntansi yang dilakukan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, relevan, dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

4.3.2 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan sehingga H_2 diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t_{hitung} 2,584 sedangkan t_{tabel} 2,018. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,584 > 2,018$) dengan signifikansi untuk variabel Kualitas Aparatur Pemerintah 0,013 yang artinya lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka H_2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan keuangan negara. Aparatur yang memiliki kualitas tinggi umumnya ditandai dengan pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi pemerintahan, kemampuan teknis yang memadai, serta komitmen terhadap etika dan integritas. Kondisi ini akan mendorong terciptanya sistem pengendalian

internal yang efektif sehingga peluang terjadinya fraud dapat ditekan secara signifikan oleh Fangela Myas Sari dkk.

Lebih lanjut, kualitas aparatur pemerintah juga berkaitan erat dengan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kecurangan sejak dini. Aparatur yang kompeten akan lebih peka terhadap indikasi penyimpangan serta mampu mengambil langkah preventif maupun korektif secara tepat. Hal ini penting karena fraud dalam laporan keuangan sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman terhadap prosedur, serta rendahnya integritas individu yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Temuan ¹⁰² penelitian ini juga ⁷⁵ mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas ⁹⁰ sumber daya manusia di sektor publik berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Aparatur yang berkualitas tidak hanya ⁹⁰ mampu menyusun laporan keuangan secara akurat dan sesuai standar, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kejujuran sehingga dapat meminimalkan praktik manipulasi data atau penyajian informasi yang menyesatkan.

Dari sisi praktis, hasil ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas aparatur pemerintah perlu menjadi prioritas bagi instansi publik. Program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesional, serta penanaman nilai-nilai etika dan integritas harus terus diperkuat. Selain itu, sistem rekrutmen dan promosi jabatan juga perlu memperhatikan aspek kompetensi dan rekam jejak integritas agar tercipta aparatur ⁷⁷ yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang tinggi.

Dengan demikian, semakin tinggi kualitas aparatur pemerintah, ³⁶ maka semakin efektif pula upaya pencegahan fraud dalam laporan keuangan.

Sebaliknya, rendahnya kualitas aparatur berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecurangan akibat lemahnya pengendalian dan kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur merupakan salah satu strategi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.6.8 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan sehingga H_3 diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai F_{hitung} sebesar 15,162 lebih besar dari $F_{tabel} = 3,22$ dan dapat dilihat juga bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variable Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan yang artinya H_3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Indri Yunistasia dkk, menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Penerapan akuntansi sektor publik yang baik mencerminkan adanya sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini berperan penting dalam meminimalisasi peluang terjadinya manipulasi data keuangan, karena setiap

transaksi tercatat secara sistematis dan dapat diaudit dengan mudah. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi akan mempersempit ruang bagi ⁹⁸ pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan.

Di sisi lain, kualitas aparatur pemerintah juga menjadi faktor krusial dalam pencegahan fraud. Aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta profesionalisme yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini serta mengambil tindakan preventif yang tepat. Sebaliknya, rendahnya kualitas aparatur dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan akibat kurangnya pemahaman, pengawasan, maupun integritas.

Secara simultan, kedua variabel tersebut penerapan akuntansi sektor publik ⁷⁶ dan kualitas aparatur pemerintah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa efektivitas pencegahan kecurangan ⁴⁷ tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga oleh kualitas individu yang menjalankan sistem tersebut. Sinergi antara sistem akuntansi yang kuat dan aparatur yang berkualitas akan menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peningkatan kualitas penerapan akuntansi sektor publik harus diiringi dengan pengembangan kapasitas dan integritas aparatur pemerintah. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal, serta penegakan etika dan disiplin kerja. Jika kedua aspek ini berjalan secara optimal, maka risiko terjadinya fraud dalam laporan keuangan pemerintah dapat diminimalkan secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut diperlukan aplikasi SPSS 27 untuk mengolah data. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Penerapan Akuntansi sektor Publik berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan sehingga H_1 diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi sektor publik dalam suatu organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap fraud laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh adanya prosedur dan mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat, mulai dari proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Dengan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, potensi terjadinya kesalahan maupun kecurangan dapat diminimalkan.
2. Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan sehingga H_2 diterima. Semakin tinggi kualitas aparatur pemerintah, maka semakin efektif pula upaya pencegahan fraud dalam laporan keuangan. Sebaliknya, rendahnya kualitas aparatur berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecurangan akibat lemahnya

pengendalian dan kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur merupakan salah satu strategi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

3. Uji simultan bahwa Berdasarkan tabel 4.13, Dapat disimpulkan bahwa variable Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan yang artinya H_3 diterima.
4. Uji Koefisien Determinasi menunjukkan hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,419 artinya adalah bahwa terdapat sebanyak 41,9% pengaruh variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 58,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan atau diteliti dalam penelitian.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya antara lain:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Diharapkan OPD dapat terus meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas aparatur pemerintah perlu dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan penguatan integritas guna meminimalkan potensi fraud dalam laporan keuangan. OPD juga disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal

serta memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan agar transparansi dan akuntabilitas ¹⁰⁴ semakin meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat memengaruhi pencegahan fraud laporan keuangan, seperti sistem pengendalian internal, budaya organisasi, atau pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan jumlah sampel agar hasil penelitian lebih representatif. Metode penelitian juga dapat dikembangkan, misalnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena fraud di sektor publik.

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

22%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unisi.ac.id	Internet Source	4%
2	ecampus.uinmybatusangkar.ac.id	Internet Source	2%
3	ojs.selodangmayang.com	Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id	Internet Source	2%
5	repository.unisi.ac.id	Internet Source	2%
6	journal.pencerah.org	Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Putera Batam	Student Paper	1%
8	www.koranriau.co	Internet Source	1%
9	owner.polgan.ac.id	Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Dian Nuswantoro	Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Negeri Jakarta	Student Paper	1%
12	repo.darmajaya.ac.id	Internet Source	1%
13	ayoriau.co	Internet Source	1%
14	online-journal.unja.ac.id	Internet Source	1%
15	repository.stiegici.ac.id	Internet Source	1%

16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
18	jurnal.umb.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.itsi.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.kdi.or.id Internet Source	<1 %
21	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
22	Hilda Salma Jundia, Aris Eddy Sarwono, Dewi Saptantinah Puji Astuti. "ANALISIS PENINGKATKAN KUALITAS KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI JAWA TENGAH", JURNAL MANEKSI, 2023 Publication	<1 %
23	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
24	voxindonews.com Internet Source	<1 %
25	journal.uir.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Konsorsium PTS Batch 5 Student Paper	<1 %
27	Submitted to Telkom University Student Paper	<1 %
28	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
29	Sahmin Noholo. "Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Intervening Pencegahan Fraud", Jambura Accounting Review, 2021 Publication	<1 %
30	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %

31	Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
33	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Rose-Hulman Institute of Technology Student Paper	<1 %
35	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
36	Fadila Kadir, Hartati Tuli, Ayu Rakhma Wuryandini. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo)", Science and Education Journal (SICEDU), 2026 Publication	<1 %
37	Gilbert Septian Taruli Silitonga, Yogi Radika Yuda Lubis, Yoga Alfrido Purba, Angga Ryan Syahputra et al. "Analisis Sistem Akuntansi Instansi dalam Upaya Pencegahan Kerugian Daerah Berdasarkan Temuan BPK pada LKPD Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Publication	<1 %
38	Submitted to LPPM Student Paper	<1 %
39	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
41	publikasi.dinus.ac.id Internet Source	<1 %
42	Kaillin Lalli Randa, Ida Ayu Purba Riani, Balthazar Kreuta. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2019 Publication	<1 %
43	conference.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
44	jetsiber.com Internet Source	<1 %

		<1 %
45	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	<1 %
46	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
47	Hilma Harmen, Jonathan Siringoringo, Luhut Manurung, Najha Nawanda et al. "Pengaruh Pengawasan Internal dan Etika Kerja terhadap Disiplin Kerja Pegawai pada Balai Besar POM di Medan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
48	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
49	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
50	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
51	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
52	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
53	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
54	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
55	jdih.cirebonkota.go.id Internet Source	<1 %
56	Ayu Anjani, Wahyu Dewi Hapsari. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024 Publication	<1 %
57	eprints.stiebankbpdjateng.ac.id Internet Source	<1 %
58	adoc.pub Internet Source	<1 %

59	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
62	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
63	repository.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
64	riau.bpk.go.id Internet Source	<1 %
65	riaupos.co Internet Source	<1 %
66	Suci Suriani, Andika Prasetya, Wan Arif Hidayatullah, Bobby Arifin. "PENTINGNYA PEMAHAMAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TERHADAP JABATAN FUNGSIONAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN", Jurnal Transformasi Administrasi, 2024 Publication	<1 %
67	Rosihan Rosihan, Bonifasia Elitha Bharanti, Westim Ratang. "PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH, REGULASI, SISTEM INFORMASI DAN KOMITMEN TERHADAP MANAJEMEN ASET", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2017 Publication	<1 %
68	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
69	Submitted to Universitas Papua Student Paper	<1 %
70	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
71	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
73	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1 %

74	data.sekadaukab.go.id Internet Source	<1 %
75	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
76	juris.id Internet Source	<1 %
77	nuansaonline.net Internet Source	<1 %
78	Harry Aprsiansyah, Sri Rahayu, Misni Erwati. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo", Jambi Accounting Review (JAR), 2020 Publication	<1 %
79	Sutrio Yulyanto, Kiswanto Kiswanto. "Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	<1 %
80	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
81	etdci.org Internet Source	<1 %
82	issuu.com Internet Source	<1 %
83	putrispm.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
85	files.core.ac.uk Internet Source	<1 %
86	jurnal.stiabengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
88	MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 2 Desember 2012", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2012 Publication	<1 %

89	Muhammad Khatib Shiddieqy, Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar. "Pengaturan Peranan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pesantren Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2024", <i>Journal of Innovative and Creativity (Joecy)</i> , 2026 Publication	<1 %
90	Niken Wulan Ashari, Maya Widyana Dewi, Sri Laksmi Pardanawati. "Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan Ditinjau Dari Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia", <i>Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis</i> , 2025 Publication	<1 %
91	Siska Marini Pilander, David Paul Saerang, Hendrik Gamaliel. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu", <i>JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"</i> , 2018 Publication	<1 %
92	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
93	riau.antaranews.com Internet Source	<1 %
94	voxntt.com Internet Source	<1 %
95	www.scribd.com Internet Source	<1 %
96	Dumariani Silalahi, Berlin Barus, Monang Tarigan, Harlen Silalahi. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN", <i>Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran</i> , 2025 Publication	<1 %
97	Novita Fitriyani, Helmi Herawati. "PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH)", <i>JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz</i> , 2019 Publication	<1 %
98	Yosua Febrian Putra Aditya, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. "LOCAL WISDOM: CAN IT MITIGATE THE RISK OF FRAUD?", <i>ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)</i> , 2020 Publication	<1 %

99	Dwi Febri S, Sri Rahayu, Wiralestari. "Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kota Jambi)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2019 Publication	<1 %
100	Ismi Ajeng, Rani Diana. "RUMUSAN STRATEGI BISNIS SUB TERMINAL AGRIBISNIS CIGOMBONG KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR", AGRITA (AGri), 2020 Publication	<1 %
101	idoc.tips Internet Source	<1 %
102	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
103	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
104	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
105	www.portalkaltara.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On